

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan terciptanya pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di instansi pemerintah selama satu tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang pelaporannya diatur dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/1999 jo Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada ketentuan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal menyusun laporan hasil kegiatan selama Tahun 2023 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemerintahan yang didasarkan pada perencanaan strategis.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 29.B Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini masih jauh dari sempurna sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dalam penyusunan laporan ini senantiasa diharapkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan di waktu yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal tahun 2023 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tegal, Februari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tegal

SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP.

Pembina Tingkat I
NIP 19760510 199602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL.....	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM TUGAS DAN FUNGSI	1
B. ISU STRATEGIS	2
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	4
B. PERJANJIAN KINERJA	4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	6
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	7
B. REALISASI ANGGARAN	16
BAB IV PENUTUP	18
A. KESIMPULAN	18
B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	19
C. SARAN	20
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Renstra DPMPTSP Kota Tegal Tahun 2019-2024.....	4
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Tegal Tahun 2023...	5
Tabel 3.1.	Pengukuran dengan Skala Ordinal.....	7
Tabel 3.2.	Pengukuran Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2023.....	7
Tabel 3.3.	Perbandingan Capaian IKU dengan Tahun Sebelumnya.....	9
Tabel 3.4.	Perbandingan Capaian IKU dengan Target Akhir Renstra.....	10
Tabel 3.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kab Brebes.....	10
Tabel 3.6.	Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023.....	11
Tabel 3.7.	Capaian Anggaran Tahun 2023 per Program.....	16
Tabel 3.8.	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kinerja.....	17
Tabel 4.1.	Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....	18
Tabel 4.2.	Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat atas Impelentasi SAKIP.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, administrasi dan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal mempunyai peran dan tugas penting sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 8.B Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

Mengingat penting dan strategisnya tugas-tugas tersebut, kemampuan dalam menyusun dan merumuskan kebijakan publik sangat diperlukan bagi aparatur dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal. Guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah perlu menciptakan aparatur yang profesional, kreatif, disiplin serta memiliki produktivitas tinggi sebagai upaya terwujudnya pemerintahan yang baik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal, dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pembinaan dan fasilitasi di bidang penanaman modal, dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;

5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal, dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
6. Pengendalian administrasi kesekretariatan Dinas; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. ISU STRATEGIS

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal yaitu :

1. Implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya menuntut daerah untuk segera melaksanakan percepatan penyesuaian aturan pelaksanaan dalam rangka peningkatan investasi daerah;
2. Implementasi OSS RBA sebagai amanat UU Cipta Kerja masih terkendala secara sistem sehingga daerah masih menunggu kebijakan pusat terkait pelaksanaan OSS RBA;
3. Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan perizinan berusaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dikoordinasikan oleh DPMPTSP sehingga perlu dibentuk tim pengawasan lintas sektoral;
4. Perlunya peningkatan kegiatan promosi yang memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi (TI);
5. Belum disusunnya peta potensi investasi yang dapat digunakan sebagai rancangan awal strategi arah kebijakan serta prioritas pengembangan investasi;
6. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengisi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara *online*;
7. Kesulitan dari aparatur di daerah untuk mengikuti dinamika perubahan regulasi yang sangat cepat.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal sebagai berikut :

- a. Meningkatkan investasi Kota Tegal dengan menciptakan iklim investasi dan kemudahan berbisnis;
- b. Meningkatkan pelayanan publik baik layanan perizinan dan non perizinan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi;
- c. Pengembangan promosi potensi investasi diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di Kota Tegal.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I - Pendahuluan, menguraikan tentang gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis dan sistematika penyajian.

BAB II - Perencanaan Kinerja, menguraikan tentang Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

BAB III - Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja serta akuntabilitas keuangan.

BAB IV - Penutup, menguraikan tentang kesimpulan seluruh isi Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal Tahun 2023 serta Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 – 2024 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah berdasarkan periode RPJMD Kota Tegal 2019-2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.
Renstra DPMPTSP Kota Tegal Tahun 2019-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya nilai investasi	Realisasi Investasi			1,60 T	1,76 T	1,79 T	1,82 T	1,85 T
		Meningkatkan nilai investasi	Realisasi Investasi	1,60 T	1,76 T	1,79 T	1,82 T	1,85 T
			Rasio daya serap tenaga kerja	NA	6%	7%	8%	9%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan dan non perizinan			86	89	89	89	89
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan dan non perizinan	86	89	89	89	89

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 tidak lepas dari dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019-2024, RKPD Kota Tegal Tahun 2023, serta Indikator Kinerja Utama

yang ada dalam Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 060/122.2/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Tegal Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	Realisasi Investasi	Triliun Rp.	1,82
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	89

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kerangka Pengukuran Kinerja dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut di atas dirumuskan sebagai berikut :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} : \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} : \frac{(2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
> 95	Sangat Baik
81 - 95	Baik
41 - 80	Cukup
21 - 40	Kurang
0 - 20	Sangat Kurang

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

❖ CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.
Pengukuran Realisasi dengan Target Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	% Capaian	Kategori
Meningkatnya Nilai Investasi	Realisasi Investasi	1,82 (Triliun Rp.)	1,89 (Triliun Rp.)	104,16	Sangat Baik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	89	92,76	104,22	Sangat Baik
Rata-Rata Capaian IKU				104,19	

Adapun analisa dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 sebagai berikut :

1) Realisasi Investasi

Realisasi investasi diambil dari data *Online Single Submassion* (OSS) RBA dari perizinan baru yang diterbitkan DPMPTSP Kota Tegal tahun 2023 sebesar Rp. 1.895.735.558.681,00 yang berasal dari sektor primer, sekunder dan tersier yang terdiri 10.818 proyek investasi dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 35.214 orang.

Capaian indikator Realisasi Investasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 1,89 Triliun dari target Rp. 1,82 Triliun sehingga persentase capaiannya sebesar 104,16 %.

Faktor pendorong tercapainya indikator realisasi investasi antara lain :

- a. Meningkatnya iklim usaha dan promosi potensi investasi;
- b. Kemudahan layanan perizinan berusaha menggunakan strategi jemput bola.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 19 telah mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing. Undang-Undang tersebut mewajibkan penyelenggara mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik yang selanjutnya disebut standar pelayanan, untuk mendapatkan kepastian hukum, biaya, persyaratan, prosedur dan mekanisme maka diperlukan standar pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan suatu langkah yang tepat untuk

mengakomodasi harapan penerima layanan, menilai tingkat kepuasan penerima layanan terhadap kinerja pemerintah terutama aparat dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program pelayanan publik yang efektif dan tepat sasaran.

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada tahun 2023 sebesar 92,76 dari target 89 sehingga persentase capaiannya sebesar 104,22%.

Faktor pendorong tercapainya indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yaitu komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik melalui inovasi yang berkelanjutan.

❖ **PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA**

Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian IKU dengan Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian Tahun 2023		
				Target	Capaian	% Capaian
1	Realisasi Investasi	1,29 (Triliun Rp.)	3,19 (Triliun Rp.)	1,82 (Triliun Rp.)	1,89 (Triliun Rp.)	104,16
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	89,47	90,85	89	92,76	104,22

❖ **PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA**

Tabel 3.4.
Perbandingan Capaian IKU dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	Target Akhir Renstra	% Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Realisasi Investasi	1,89 (Triliun Rp.)	1,85 (Triliun Rp.)	102,16	Sudah tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	92,76	89	104,22	Sudah tercapai

❖ **PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN REALISASI KINERJA REGIONAL / NASIONAL**

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Kab Brebes

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	
			Kota Tegal	Kab. Brebes
1	Realisasi Investasi	Triliyun Rp	1.895.735.558.681	1.835.624.430.761
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	92,76	80,81

❖ **CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal tahun 2023 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.6.
Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Indikator	Target	Capaian	% Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	100	100
			Persentase Capaian Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	100	100	100
			Persentase Capaian Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Indikator	Target	Capaian	% Realisasi
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	28	100
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30	28	93,33
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	61	61	100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30	30	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1200	1200	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	52	52	100

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Indikator	Target	Capaian	% Realisasi
			Penggandaan yang Disediakan			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	2	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	3	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	1	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	12	100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39	39	100

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator	Target	Capaian	% Realisasi
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Peningkatan Investasi	2	3,83	191,5
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	1	100
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	1	100
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Kepeminatan Investasi	2	8	400
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	3	100
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89	92,76	104,22
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3000	4351	145

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan			Indikator	Target	Capaian	% Realisasi
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	30	38	126,67
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50	65	130
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Persentase kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	60	65	108,33
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	65	71	109,23
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	437	531	121,51
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	20	57	285
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			Persentase pemenuhan informasi data investasi	100	100	100

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Indikator	Target	Capaian	% Realisasi
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	1	100

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran tahun 2023 dari program penunjang sasaran strategis sebagai tabel berikut :

Tabel 3.7.
Capaian Anggaran Tahun 2023 per Program

No	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.497.935.090	4.337.378.852	96,43
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	78.153.800	64.953.800	83,11
3	Program Promosi Penanaman Modal	205.934.200	205.632.200	99,85
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	323.274.500	318.773.500	98,61
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	419.293.000	397.429.000	94,79
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	37.746.300	36.636.300	97,06
	Jumlah	5.562.336.890	5.360.803.652	96,38

Secara keseluruhan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 5.360.803.652,00 dari anggaran sebesar Rp. 5.562.336.890,00 atau 96,38%.

Adapun tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatkan nilai investasi	Realisasi Investasi	Triliun Rp.	1,82	1,89	104,16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.497.935.090	4.337.378.852	96,43
							Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	78.153.800	64.953.800	83,11
							Program Promosi Penanaman Modal	205.934.200	205.632.200	99,85
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	419.293.000	397.429.000	94,79
							Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	37.746.300	36.636.300	97,06
	Rata-Rata Capaian Indikator :					104,16	Total Persasaran	5.239.062.390	5.042.030.152	96,24
	Tingkat Efisiensi :					-				
	Tingkat Efektifitas :					-				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan dan non perizinan	Nilai	89	92,76	104,22	Program Pelayanan Penanaman Modal	323.274.500	318.773.500	98,61
	Rata-Rata Capaian Indikator :					104,22	Total Persasaran	323.274.500	318.773.500	98,61
	Tingkat Efisiensi :					-				
	Tingkat Efektifitas :					-				

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal atas Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal Tahun 2023 yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Realisasi Investasi	1,82 (Triliun Rp.)	1,89 (Triliun Rp.)	104,16
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	89	92,76	104,22
Rata-Rata Capaian					104,19

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengukuran rata-rata capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal Tahun 2023 sebesar 104,19% dengan kategori “Sangat Baik’. Capaian tertinggi adalah Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan” dengan indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan” sebesar 104,22% dengan kategori “Sangat Baik”.

Anggaran untuk mendukung realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal Tahun 2023 sebesar Rp. 5.562.336.890,00 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.360.803.652,00 atau 96,38%.

B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal tahun sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi dalam rangka lebih mengefektifkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakannya sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat atas Impelentasi SAKIP

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	Seluruh pimpinan unit kerja/bidang yang ada pada DPMPTSP Kota Tegal agar didorong aktif ikut melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi atas Kinerja	Rapat Monitoring Evaluasi Kinerja Triwulanan bersama seluruh unit kerja/bidang
2	Penjabaran kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya di LKjIP agar dijadikan langkah perbaikan yang dituangkan dalam Renja	Renja Bab II (Evaluasi Pelaksanaan Renja) dilengkapi dengan penjelasan langkah perbaikan terhadap target yang tidak tercapai
3	Monev Triwulan agar ditambahkan informasi mengenai faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target di setiap triwulan	Menghimpun data faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target di setiap triwulan
4	Pengukuran Kinerja agar menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan dan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	Usulan pengisian jabatan
5	Dokumen laporan kinerja agar mengungkap secara menyeluruh informasi tentang pencapaian kinerja tentang target dan realisasi seluruh pegawai (Eselon 2 - 4, Fungsional, dan struktural)	LKjIP disertai informasi capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja
6	Dokumen Laporan Kinerja agar ditambahkan informasi mengenai	LKjIP disertai pembandingan dengan capaian kinerja daerah

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
	analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level regional maupun nasional (<i>Benchmark Kinerja</i>)	sekitar di level regional maupun nasional
7	LKjIP agar memberikan informasi mengenai target dan realisasi yang telah ditetapkan pada sasaran dan perjanjian kinerja sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan	LKjIP disertai informasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
8	Melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Tegal untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaan monitoring kinerja sebagai bentuk evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Koordinasi dengan Bappeda untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaan monitoring kinerja

C. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain :

1. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perbaikan perencanaan dan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Tegal, Februari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal

SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP.

Pembina Tingkat I

NIP 19760510 199602 1 003

LAMPIRAN

I. RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TEGAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Realisasi Investasi	Triliun Rp.	1,82
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai	89

II. PERJANJIAN KINERJA

	PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Ki Gede Sebayu No.3 Kota Tegal Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52123
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama : SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal	
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA	
Nama : DEDY YON SUPRIYONO, S.E., M.M. Jabatan : Wali Kota Tegal	
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.	
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Tegal, 25 Januari 2023	
PIHAK KEDUA Wali Kota Tegal  DEDY YON SUPRIYONO, S.E., M.M.	PIHAK PERTAMA Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal  SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP Pembina Tingkat I NIP. 19760510 199602 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan nilai investasi	1. Realisasi Investasi	Triliun Rp.	1,82
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	Nilai	89

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.635.076.652	APBD
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	78.153.800	APBD
3.	Program Promosi Penanaman Modal	176.698.600	APBD
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	326.324.500	APBD
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	427.353.000	APBD/APBN
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	37.746.300	APBD
TOTAL		5.681.352.852	

Tegal, 25 Januari 2023

PIHAK KEDUA

Wali Kota Tegal



OEDY SUPRIYONO, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal



SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19760510 199602 1 003

III. PRESTASI / PENGHARGAAN 2023

Terbaik Keempat
Anugerah Layanan
Investasi dari
Kementerian
Investasi/BKPM



**Predikat Terbaik untuk Wilayah
Indonesia Bagian Barat**
Anugerah Layanan Investasi Bahari
Sail Teluk Cendrawasih



